

MODEL PENUNTASAN WAJIB BELAJAR DIKDAS 9 TAHUN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Darmono dan Hiryanto

Penelitian ini menfokuskan pada upaya penuntasan wajar dikdas sembilan tahun dengan menawarkan sebuah model yang mengambil lokasi pada salah satu wilayah kecamatan di suatu kabupaten yang masih termasuk rendah APK-nya yaitu di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Kecamatan Karang Intan.

Obyek penelitian ini pada tahun pertama (2007) ini adalah semua lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta, formal maupun non formal yang ada di wilayah Kecamatan Karang Intan, yang meliputi: (1) SD/MI, (2) SMP/MTs, (3) PKBM penyelenggara program Kejar Paket A dan B (pendidikan kesetaraan), (4) Pondok pesantren penyelenggara wajar dikdas sembilan tahun, dan (5) Anak belum/putus sekolah usia pendidikan dasar (umur 6-15 tahun). Indikator penuntasan wajar dikdas di Kecamatan Karang Intan tersebut menarik untuk dilakukan penelitian dengan menawarkan suatu model penuntasan wajar dikdas sembilan tahun.

Hasil penelitian menunjukkan di seluruh wilayah Kecamatan Karang Intan terdapat: (1) 32 SD/MI baik itu negeri maupun swasta, (2) terdapat 4 desa (15,38%) yang tidak memiliki SD/MI, (3) terdapat 8 desa yang memiliki SD/MI lebih dari satu sekolah, dan (4) ada 14 desa yang masing-masing hanya terdapat 1 SD/MI. Untuk sarana pendidikan tingkat SLTP telah terdapat 2 SMP Negeri, 3 SSA Negeri, 1 SMP terbuka, dan 5 buah MTs baik negeri maupun swasta. Selain itu, masih terdapat tambahan dukungan sarana percepatan penuntasan wajar dikdas sembilan tahun yaitu berupa PKBM pelaksana Kejar Paket A dan B sebanyak 6 buah dan Pondok Pesantren Miftahussibbyan yang berpusat di Desa Mandi Kapau Timur yang telah memiliki unit sebanyak 6 cabang di desa lain. Tiga penyebab utama anak putus/belum sekolah adalah kondisi ekonomi orang tua (60,52%), letak geografis tempat tinggal (18,00%), sosial budaya (9,58%), dan sisanya adalah alasan lainnya. Penyebaran anak yang belum/putus sekolah berdasarkan kelompok umurnya yang terbesar yaitu umur 15 Tahun (54,28%), diikuti umur 14 tahun (18,00%), dan 13 tahun (16,26%). Untuk umur 6 s.d. 12 tahun mempunyai bobot sisanya. Hasil penelitian tahun pertama (2007) ini baru merupakan langkah awal dari penerapan model penelitian yang direncanakan. Oleh sebab itu, agar diperoleh model yang utuh dan untuk melihat sejauhmana efektivitas model yang ditawarkan perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan penelitian pada tahun kedua (2008) sebagai penelitian tindakan lapangan.

Kata kunci: wajib belajar, dikdas 9 tahun, dan Kalsel.

FT, 2007 (PEND. TEK. SIPIL & PERENCANAAN)